



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 443/Kep.952 – BPBD/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 443/Kep.301 –
BPBD/2020 TENTANG STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA WABAH
PENYAKIT AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa status tanggap darurat bencana penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019* telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.301-BPBD/2020, namun dengan belum adanya pencabutan status tanggap darurat dari Pemerintah sampai dengan akhir Tahun 2020, maka diperlukan perpanjangan dan perubahan atas Keputusan Wali Kota dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.301 – Bpbd/2020 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.01/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan penanggulangannya;
15. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (COVID-19) di Wilayah Provinsi Banten;
16. Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.301-BPBD/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019;
17. Keputusan Wali Kota Nomor 800/Kep.702-BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Kota Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor 800/Kep.740-BPBD/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor Nomor 800/Kep.702-BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Tangerang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.301 – BPBD/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019*.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan Pencabutan status Tanggap Darurat dari Pemerintah.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan masa penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berakhir yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 30 Desember 2020



WALIKOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH